

BAB III

PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI PAKISTAN (1948-1970)

Pakistan adalah sebuah negara yang berada di Kawasan Asia Selatan dengan sejarah yang kaya dan kompleks. Setelah memperoleh kemerdekaannya 1947, Pakistan harus menghadapi tantangan-tantangan politik dan ekonomi yang besar. Pada periode 1948-1970, berbagai perubahan signifikan terjadi di dalam negeri. Bab ini penulis akan menjelaskan tentang perkembangan politik dan ekonomi Pakistan pada periode tersebut, dimulai dari konsolidasi kekuasaan, sistem pemerintahan, keuangan dan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, inflasi dan krisis energi di Pakistan.

A. Konsolidasi Kekuasaan dan Pembentukan Konstitusi

Pembentukan Pakistan pada tahun 1947 merupakan hasil dari pemisahan antara India dan Pakistan oleh Inggris, sebagai upaya untuk mengakhiri kekuasaan Inggris di India yang berkepanjangan. Pemisahan ini didasarkan pada agama, dimana Pakistan adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan India mayoritas penduduknya beragama Hindu. Pakistan pada awalnya dipimpin oleh Gubernur Jenderal Muhammad Ali Jinnah, dan Liaquat Ali Khan sebagai Perdana Menteri. Sebagai negara baru, Pakistan mengalami banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya konsolidasi kekuasaan setelah kemerdekaan. Baik masalah politik, sosial, maupun ekonomi. Pertama-tama, Pakistan harus membangun suatu pemerintahan dengan konstitusi yang diakui. Pembentukan pemerintahan yang kuat dan efektif adalah hal penting dalam mengamankan kekuasaan dan menjaga stabilitas negara, sementara konstitusi akan menjadi kerangka kerja untuk mengatur tata kelola negara. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Ghulam ddk (2012:1) :

Pemerintah Pakistan mulai berfungsi di bawah Undang-Undang India tahun 1935 yang dimodifikasi setelah pendiriannya. Di pusat, Majelis Konstituante menjalankan dua fungsi. Itu telah bertindak sebagai badan legislatif pusat dan berupaya meringkai konstitusi untuk negara baru.

Dari pernyataan tersebut dapat diambil pengertian bahwa pemerintah Pakistan berusaha membangun struktur pemerintahan yang kuat dan efektif melalui pembentukan konstitusi dan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada hukum Islam. Namun, melihat Pakistan yang masih berada dalam keadaan yang tidak stabil pasca kemerdekaan, pemerintah Pakistan menetapkan

konstitusi interim pada tahun 1947 dengan mengadopsi Undang-Undang India 1935 yang dimodifikasi. Selanjutnya, pemerintah Pakistan membentuk Majelis Konstituante yang berfungsi sebagai badan legislatif pusat dan dalam kurun waktu yang bersamaan berusaha untuk menyusun sebuah konstitusi untuk negara baru.

Undang-undang India tahun 1935 dicabut setelah kemerdekaan India dan Pakistan, tetapi pemerintah Pakistan memilih untuk tetap memodifikasi beberapa elemen dari undang-undang tersebut sesuai dengan kebutuhan dan konteks nasional. Majelis konstituante sendiri memiliki dua tugas utama, yakni membuat undang-undang baru dan bahkan menyusun konstitusi baru untuk menyusun negara baru yang tidak hanya mencakup aspek politik tetapi juga ekonomi, sosial, dan kultural. Dengan fungsi legislatif dan pembentukan konstitusi, Majelis Konstituante Pakistan dimaksudkan untuk menciptakan institusi politik yang kuat dan stabil bagi Pakistan. Namun, proses ini tidak berjalan begitu mulus mengingat terdapat tantangan politik, dan konflik internal yang mengganggu upaya konsolidasi kekuasaan di negara itu. Meskipun begitu, upaya konsolidasi kekuasaan yang dilakukan melalui pembentukan Majelis Konstituante ini merupakan langkah penting dalam upaya menjadikan Pakistan sebagai negara yang berdaulat yang kuat dan stabil.

Pada perkembangannya, proses penyusunan konstitusi pertama Pakistan mencapai puncaknya pada tahun 1956 ketika Majelis Permusyawaratan Pakistan menyetujui dan mengesahkan konstitusi baru yang sudah disepakati oleh seluruh partai politik. Konstitusi baru ini mengatur sistem pemerintahan federal, hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan hak-hak warga negara lain.

Pada 8 Januari 1956, pemerintah Pakistan memperkenalkan undang-undang konstitusi baru di majelis yang kemudian diadopsi dengan beberapa perubahan/amademen pada tanggal 23 Februari 1956. Konstitusi baru ini mulai berlaku di seluruh Pakistan pada tanggal 23 Maret 1956, yang merupakan tonggak bersejarah dalam sejarah Pakistan. Pembentukan konstitusi baru Pakistan merupakan suatu tindakan penting dalam sejarah negara dan sebuah momen penting yang menunjukkan bahwa Pakistan telah memiliki dasar hukum yang jelas, serta mengukuhkan negara sebagai entitas yang independen dan mandiri. Konstitusi baru ini menegaskan hak-hak asasi manusia dan prinsip-prinsip dasar konstitusional, termasuk pembentukan parlemen dan pengakuan hak-hak fundamental bagi semua warga negara Pakistan. Konstitusi ini juga

menetapkan bahwa setiap provinsi memiliki hak otonomi yang memadai dan bahwa pemerintah federal harus menghormati hak-hak provinsi dalam kebijakan nasional (Rizwan dkk, 2018).

Melalui pembentukan konstitusi, pemerintah Pakistan berhasil menyusun dasar hukum dan politik yang adil dan merata bagi seluruh warga negara. Hal ini membantu membangun kepercayaan dan solidaritas di antara kelompok etnis yang berbeda di Pakistan, serta mengurangi ketegangan politik dan sosial yang berkaitan dengan perbedaan etnis tersebut.

Pembuatan konstitusi Pakistan pasca kemerdekaan memiliki hubungan yang erat dengan pengakuan kedaulatan oleh negara lain. Konstitusi baru ini menandakan bahwa Pakistan telah memiliki identitas dan kedaulatan politik yang independen. Dalam dunia internasional, konstitusi tersebut dianggap membuktikan bahwa Pakistan sebagai negara berdaulat yang bertanggung jawab atas warganya dan tidak tergantung pada negara lain dalam mempengaruhi dan membentuk kebijakan politik mereka. Selain itu, pembentukan konstitusi Pakistan juga memungkinkan Pakistan untuk terlibat secara aktif di panggung internasional dan menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara lain untuk tujuan ekonomi, politik, dan keamanan.

Pembentukan konstitusi Pakistan pasca kemerdekaan dan upaya diplomasi sebagai konsolidasi kekuasaan di Pakistan pasca kemerdekaan memiliki kaitan yang sangat erat. Untuk membentuk konstitusi yang stabil, pemerintah Pakistan melakukan upaya diplomasi untuk meminta bantuan dan dukungan dari negara-negara lain. Setelah Pakistan menjadi anggota PBB pada tahun 1948, pemerintah Pakistan mulai membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara anggota PBB dan mendapatkan dukungan internasional dalam upaya konsolidasi kekuasaan. Hubungan dengan India menjadi salah satu fokus utama upaya diplomasi Pakistan pasca kemerdekaan, sebab hubungan antara Pakistan dan India mulai memburuk dan bergejolak. Masalah utama yang mempengaruhi hubungan kedua negara adalah konflik di wilayah Kashmir. Setelah tahun 1948, Pakistan melakukan upaya diplomasi dengan tujuan memperbaiki hubungan kedua negara. Ini dilakukan dengan mengikutsertakan pihak ketiga. Diplomasi ini membantu memupuk hubungan dengan India dan menciptakan suasana yang lebih stabil. Namun pada perkembangannya, hubungan antar kedua negara tersebut harus berakhir dengan peperangan

ditahun 1965 yang mengakibatkan hubungan antara Pakistan dan India menjadi semakin buruk. (Monica dan Rhoma, 2017)

Selain dengan India, pemerintah Pakistan juga menjalin hubungan dengan negara-negara lain, seperti Inggris, China, Mesir, Arab dan Amerika Serikat. Melalui upaya diplomasi ini, Pakistan dapat menjalin hubungan dengan negara-negara lain dan mendapatkan dukungan untuk proses konsolidasi kekuasaan. Upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Pakistan sangat penting dalam mempercepat konsolidasi kekuasaan dan pembentukan konstitusi pasca kemerdekaan. Dalam hal ini, diplomasi membantu Pakistan untuk membangun hubungan diplomasi dan memperkuat posisi politik, ekonomi, dan sosial di tingkat regional dan internasional.

B. Sistem Pemerintahan Pakistan

Sistem pemerintahan Pakistan pasca kemerdekaannya pada tahun 1947 dapat dipahami melalui latar belakang sejarah dan politiknya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pemerintahan di Negara Pakistan, seperti masalah etnis, persaingan kepentingan politik, adanya peran militer, bahkan adanya konflik terhadap konstitusi. Setelah memperoleh kemerdekaannya, Pakistan secara resmi menjadi sebuah negara merdeka dengan sistem pemerintahan parlementer yang didasarkan pada konstitusi federal. Ini sesuai dengan yang dikemukakan Muhammad Rizwan dkk (2018:3) bahwa :

Undang-Undang India tahun 1935 yang diadopsi sebagai konstitusi sementara Pakistan pada awal kemerdekaannya, Pakistan mengadopsi sistem pemerintahan parlementer. Meskipun pada saat yang sama dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang sulit, itu adalah bentuk pemerintahan yang cocok untuk masyarakat seperti Pakistan. Sistem ini menuntut budaya politik demokrasi yang sehat.

Dari pernyataan tersebut dapat diambil pengertian bahwa bentuk sistem pemerintahan pertama Pakistan pasca kemerdekaannya adalah sistem pemerintahan parlementer. Pemerintahan parlementer adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan eksekutif berasal dari parlemen atau badan legislatif. Kekuasaan dipegang oleh partai politik yang memenangkan mayoritas di parlemen. Dalam sistem parlementer, pemimpin pemerintahan (perdana Menteri) dipilih diantara anggota parlemen tersebut. Sistem parlementer menuntut budaya politik demokrasi yang sehat, di mana kekuasaan dipindahkan dari rakyat ke pemerintah dengan cara yang adil dan transparan.

Dalam konteks Pakistan, sistem parlementer dianggap cocok untuk masyarakat karena memberikan kesempatan yang sama bagi setiap partai politik untuk bersaing secara adil dalam pemilihan umum. Hal ini juga membuka jalan untuk pengambilan keputusan dan pengendalian yang efektif dalam pemerintahan. Meskipun sulit ditegakkan pada awalnya, sistem parlementer pada akhirnya dapat membuka jalan bagi pengembangan pola pikir yang sehat dan keterlibatan masyarakat yang lebih aktif dalam politik dan pembangunan negara.

Sistem pemerintahan parlementer Pakistan berlangsung dari tahun 1947-1956. Selama periode tersebut, terdapat beberapa perubahan dalam struktur dan komposisi pemerintahan. Pada tahun 1947, Pakistan didirikan sebagai negara federal yang terdiri dari 4 provinsi, yakni Punjab, Sindh, Balochistan, dan Khyber Pakhtunkhwa (dulu dikenal sebagai Provinsi Perbatasan Laut). Sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan didasarkan pada model Inggris, dengan pemerintahan dikepalai oleh seorang Gubernur Jenderal yang diangkat oleh Ratu Inggris. Selama periode ini, Pakistan mengalami banyak tantangan politik dan ekonomi, termasuk perang dengan India pada tahun 1948 dan krisis perbatasan dengan Afganistan pada tahun 1950-an. Sejumlah partai politik bermunculan dan saling bersaing untuk memperebutkan kekuasaan. Meskipun demikian, sistem pemerintahan parlementer terus berjalan dan Majelis Rakyat terus membahas isu-isu politik dan sosial di negara ini (Ghulam dkk, 2012).

Tidak hanya itu, selama sistem pemerintahan parlementer berlangsung di Pakistan, terjadi beberapa pergantian pemimpin negara. Diantaranya Muhammad Ali Jinnah yang merupakan Gubernur Jenderal pertama Pakistan. Namun kepemimpinannya tidak bertahan lama, sebab ditahun 1948 ia meninggal dan digantikan oleh Perdana Menterinya yaitu Liaquat Ali Khan yang menjabat dari tahun 1948 sampai dengan 1951. Ia terkenal dengan kebijakan luar negeri yang seimbang dan berusaha memperkuat ekonomi negara. Setelah kematian Liaquat Ali Khan, Khawaja Nazimuddin menjadi Perdana Menteri Pakistan dari tahun 1951 hingga 1953. Ia berfokus pada persoalan ekonomi, politik, dan toleransi antara pemerintah pusat dan provinsi di Pakistan. Gubernur Jendral selanjutnya yang menggantikan Nazimuddin adalah Ghulam Muhammad, ia berasal dari jabatan akuntan publik dan dinilai mampu memperbaiki kondisi ekonomi Pakistan yang masih belum stabil. Sejak Ghulam sakit, ia digantikan oleh Iskander Mirza, masa jabatannya adalah dari tahun 1955-1956. Iskander

Mirza merupakan Gubernur Jenderal terakhir di Pakistan sebelum konstitusi baru diadopsi tahun 1956. Ia kemudian menjadi presiden pertama Pakistan setelah negara ini menjadi republik. Meskipun terjadi pergantian pemimpin, sistem pemerintahan parlementer di Pakistan tetap berjalan sesuai dengan konstitusi yang berlaku pada saat itu. Namun, keadaan politik yang tidak stabil dan konflik antar partai politik seringkali menimbulkan ketidakstabilan di negara tersebut.

Pada tahun 1956, Pakistan memiliki konstitusi kedua yang menetapkan negara ini sebagai sebuah republik parlementer. Konstitusi ini menetapkan garis-garis besar dari sistem politik dan hukum di Pakistan, dan berisi perincian tentang hak-hak sipil dan politik setiap warga negara. Konstitusi tersebut menetapkan sistem pemerintahan federal, dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Konstitusi ini juga membagi pemerintahan federal ke dalam tiga cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan kehakiman. Pada tahun 1956, Pakistan mengadakan pemilihan umum pertamanya sesuai dengan pola parlemen dan konstitusi 1956. Pemilihan ini memilih anggota-anggota Majelis Rakyat yang menjadi dasar dari pemerintahan di Pakistan. Partai Muslim League berhasil memenangkan pemilu dan membentuk federasi pertama Pakistan di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Huseyn Shaheed Suhrawardy.

Namun, tiga tahun setelah konstitusi tersebut diadopsi, pada tahun 1958 konstitusi ini harus berakhir dengan pemberlakuan darurat militer dan pencabutan konstitusi 1956. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, termasuk korupsi, krisis ekonomi dan polarisasi politik, sistem republik parlementer Pakistan 1956-1958 akhirnya berakhir dengan pernyataan darurat dan kudeta militer oleh Presiden Iskander Mirza pada tahun 1958, yang memecat pemerintah yang terpilih dan membubarkan konstitusi 1956. Sesuai dengan yang dikatakan Iftikhar (2002 :8) Ia menyatakan bahwa :

Pengambilalihan militer pertama terjadi pada Oktober 1958, Ketika Jenderal Ayub Khan merebut kekuasaan absolut. Kemudian ia memperkenalkan UUD 1962. Pemerintahannya hanya memberikan ruang terbatas bagi politisi yang patuh. Ini dilakukan melalui pemilihan tidak langsung untuk perwakilan Majelis dalam satu Skema Satu Unit, dan paritas antar sayap. Sistem terpusat melayani kepentingan Ayub Khan.

Dari pernyataan tersebut dapat diambil pengertian bahwa sepeninggal Iskander Mirza, Jenderal Ayub Khan yang menjadi peenguasa Pakistan pada saat itu. Ia memperkenalkan sistem pemerintahan yang otoriter dan sentralistik yang mengekang hak-hak demokrasi dan partisipasi politik masyarakat. Dalam

upaya untuk mempertahankan kekuasaannya, Ayub Khan mengeliminasi pendapat dan kebebasan politik dari para politisi yang tidak setuju dengan kebijakannya. Dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaannya, ia mendirikan sistem pemilihan tidak langsung dan terpusat yang mencerminkan kepentingan pribadinya. Masa pemerintahan Ayub Khan merupakan masa pemerintahan yang paling lama diantara pemimpin-pemimpin Pakistan sebelumnya. Dalam konteks sejarah Pakistan, era pemerintahan Ayub Khan juga dikenal sebagai periode modernisasi dan pembangunan ekonomi yang pesat, dimana pembangunan infrastruktur dan investasi ekonomi menjadi fokus utama. Namun, era ini juga diwarnai dengan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, seperti pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif, serta kebijakan represif terhadap gerakan sipil dan faksi politik oposisi.

Pada bulan Februari 1960, Ayub Khan mengadakan referendum untuk membuktikan popularitasnya sebagai presiden yang dipilih secara langsung. Meskipun ini adalah Tindakan yang kontroversional, 95% dari pemilih menyetujui kepemimpinan Ayub Khan. Pada tahun 1962, Ayub Khan mengeluarkan konstitusi baru yang memberikan kekuasaan yang lebih besar pada presiden. Konstitusi ini menciptakan sistem presidensial baru dimana presiden memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada Perdana Menteri dan Parlemen.

Pada perkembangannya, di tahun 1965, Pakistan terlibat dalam perang dengan India dan meskipun tidak menang, Ayub Khan mendapat pujian di dalam negeri karena keberaniannya dalam menghadapi India. Berakhirnya kepemimpinan Ayub Khan terjadi pada tahun 1969. Pada saat itu, terjadi kerusuhan di seluruh negeri, dengan demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi politik. Pada akhir tahun tersebut, Ayub Khan menyerahkan kekuasaan kepada pemimpin militer baru, yaitu Yahya Khan, ia mengumumkan darurat militer pada 25 Maret 1969. (Yasmeen, 2012)

Pada awal pemerintahan Yahya Khan, terdapat beberapa tantangan besar, termasuk ketidakstabilan politik dan sosial yang berasal dari kerusuhan anti-pemerintah di Benggala Timur. Yahya kemudian mengeluarkan Deklarasi Dasar Ketertiban pada Maret 1969 untuk merestrukturisasi pemerintahan dan menyelaraskan kebijakan dalam kurun waktu 120 hari. Selama periode 120 hari, dilakukan pembatasan kebebasan pers dan kemudian dibentuklah Komisi Konstitusi tahun 1970 untuk merancang konstitusi baru. Pada tahun 1970, Pakistan mengadakan pemilihan umum yang dianggap sebagai pemilihan umum

yang paling bebas dan adil dalam sejarah Pakistan. Pada saat itu, Yahya Khan telah menyatakan bahwa pemerintahannya akan menyerahkan kekuasaan kepada pihak yang menang dalam pemilihan. Namun, hasil pemilihan menunjukkan kemenangan Bengali di Benggala Timur dan Partai Rakyat Pakistan Barat di Barat. Ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pemimpin Barat karena mereka tidak ingin menjadi minoritas dalam pemerintahan federal. Krisis politik semakin parah dan Yahya Khan mengumumkan keadaan darurat di seluruh negara pada 1971.

C. Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Pakistan

Pasca kemerdekaan pada tahun 1947, Pakistan menghadapi sejumlah tantangan dalam mengembangkan ekonominya. Pakistan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat dan bergejolak. Pertumbuhan ekonomi di Pakistan selama periode pertama kemerdekaan memiliki basis yang kuat di sektor pertanian dan impor. Sektor pertanian menjadi tulang punggung ekonomi Pakistan pada saat itu, dengan kontribusi yang signifikan pada PDB negara tersebut. Namun, sektor ini masih bergantung pada kondisi alam, seperti curah hujan, dan masih bergantung pada cara bertani tradisional. Impor dilakukan pemerintah Pakistan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, minyak, dan mesin. Negara ini masih belum memiliki infrastruktur dan sumber daya alam yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini sesuai yang dengan pernyataan Muhammad Zahir (2021 : 179) :

Pakistan adalah negara agraris. Pertanian menyumbang 24 persen dalam pertumbuhan PDB dan menciptakan lapangan kerja hampir separuh penduduk. Pakistan hanya memiliki Rs.devisa senilai 200 juta rupee kas pusat ketika muncul sebagai negara baru di peta dunia. Populasinya 30 juta dan sulit untuk memberi makan mereka. Itu harus bergantung pada impor dari luar negeri. Itu beruntung dari basis industri, infrastruktur dasar, defisit perdagangan, keahlian teknis dan intelektual.

Dari pernyataan tersebut dapat diambil pengertian bahwa keadaan awal ekonomi Pakistan dapat diibaratkan seperti bayi yang baru lahir. Seperti bayi yang membutuhkan perawatan dan dukungan untuk tumbuh sehat, Pakistan juga memerlukan dukungan dari pemerintah dan investasi dari dalam maupun luar negeri agar dapat menjadi negara yang ,mandiri dan berkelanjutan. Sebab kondisi awal ekonomi Pakistan pasca kemerdekaan masih sangat rawan dan membutuhkan dukungan baik dari dalam maupun luar. Untuk mendorong ekspor dan meningkatkan produksi pertanian, pemerintah Pakistan mulai menerapkan

kebijakan substitusi impor. Kebijakan ini membuka peluang bagi Pakistan untuk melakukan ekspor pada pasar internasional.

Pasca kemerdekaan, Pakistan didukung oleh pinjaman besar dari Inggris dan Amerika Serikat. Dalam tiga tahun pertama, Pakistan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat, karena masalah ekonomi dan politik yang berkepanjangan. Itu juga dihadapkan dengan masalah korupsi dan kelangkaan makanan yang diakibatkan oleh imigrasi dan pembagian wilayah. Namun, pada akhir tahun 1950, dengan adanya bantuan asing dan kebijakan ekonomi yang cermat, Pakistan mulai mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif, meskipun masih jauh dari potensi yang dimiliki. Fokus pada pengembangan ekonomi berkelanjutan sedikit demi sedikit mulai membuahkan hasil. Namun, dibutuhkan upaya besar-besaran untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Pada tahun 1950an, merupakan tahap perencanaan ekonomi. Pakistan meluncurkan Rencana Lima Tahun pertamanya, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, mengembangkan industri dan pembaruan infrastruktur. Perkembangan industri didasarkan pada substitusi impor. Hingga akhirnya pada akhir tahun 1951-an, sektor industri mulai berkembang. Sektor pintar pertanian berkembang pesat selama periode awal ini, dengan terobosan dalam sektor tekstil yang telah menjadi lapangan pekerjaan yang penting untuk penduduk Pakistan. Namun, pertumbuhan ekonomi Pakistan selama periode ini terganggu oleh masalah keuangan dan politik yang signifikan, serta memperoleh tagihan yang besar untuk membangun infrastruktur, mendukung pertanian, dan membeli peralatan industri yang diperlukan untuk memacu pertumbuhan (Mushtaq, 1999).

Untuk mewujudkan substitusi impor ini, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan, yaitu dengan memberikan dukungan kepada sektor industri dalam negeri dengan cara memberikan pembebasan pajak dan subsidi bahan baku. Pemerintah juga menerapkan perlindungan perdagangan terhadap impor dengan menaikkan bea masuk pada barang-barang impor. Hal ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Pintu penanaman modal asing pun dibuka oleh pemerintah Pakistan terutama untuk membangun sektor industri manufaktur. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan pentingnya pengembangan teknologi dalam sektor industri dengan meluncurkan program peningkatan kualitas industri secara menyeluruh. Program ini menunjukkan hasil

positif dengan meningkatnya produksi dalam negeri dalam beberapa industri, termasuk tekstil, baja, dan petrokimia. Namun, kebijakan ini juga telah meningkatkan defisit transaksi berjalan akibat tingginya impor bahan mentah dan komponen dari luar negeri. Selain itu, kebijakan ini juga merusak daya saing industri dengan membatasi kompetisi dalam negeri dan kualitas produk lokal masih kurang baik dibanding produk luar negeri. Selama dekade 1950 ini, Perkembangan ekspor Pakistan meningkat namun menyebabkan ketergantungan terhadap modal asing. Darurat militer yang terjadi pada 1958 disebabkan oleh pemberian izin ekspor atau disebut dengan voucher bonus ekspor membuat tingkat pertumbuhan pertanian Pakistan menurun dan diikuti penurunan pendapatan perkapita. Standar kehidupan juga semakin menurun.(Muhammad Zahir, 2021).

Pada perkembangannya, tahun 1960an dapat dikatakan sebagai zaman keemasan, sebab pada saat itu terjadi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Ayub Khan sebagai pemimpin Pakistan pada saat itu memperkenalkan reformasi ekonomi yang drastis. Meskipun begitu, terdapat kendala dalam perlindungan tarif, basis industri yang tidak efisien, ketimpangan pendapatan, serta ketergantungan modal asing meningkat menyebabkan nilai tambah negatif dalam perekonomian. Bergantinya pemimpin di tahun 1970 pun tidak dapat memperbaiki kondisi ekonomi Pakistan yang sudah buruk. Hal ini disebabkan oleh kekacauan politik dan sosial yang terjadi pada saat itu. Sehingga dapat dikatakan kondisi ekonomi Pakistan tahun 1970 di bawah pemerintahan Yahya Khan adalah sangat lemah dan terpuruk.

D. Kemiskinan, Inflasi, dan Krisis Energi

Sejak kemerdekaannya pada tahun 1947, Pakistan mengalami beberapa masalah ekonomi yang signifikan seperti kemiskinan, inflasi, dan krisis energi. Kemiskinan menjadi masalah utama di negara ini karena sebagian besar penduduk hidup di bawah garis kemiskinan dan memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi hidup mereka. Pasca kemerdekaan, lebih dari sekitar seperempat dari penduduk Pakistan hidup di bawah garis kemiskinan. Faktor yang memperburuk kemiskinan diantaranya adalah pertumbuhan populasi yang terus meningkat, kurangnya akses ke pendidikan dan keterampilan, ekonomi yang terpusat pada

sektor pertanian, dan kurangnya akses ke lapangan kerja yang layak. Migrasi imigran menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan. (Muhammad Zahir, 2021).

Migrasi besar-besaran di Pakistan dari India pasca kemerdekaan, menyebabkan 14 juta orang muslim yang tinggal di India pindah ke Pakistan dan sebaliknya, 10 juta orang Hindu dan Sikh pindah ke India. (Iftikhar, 2002). Migrasi ini menyebabkan kemiskinan. Migrasi ini membuat banyak orang kehilangan mata pencaharian mereka dan terpaksa meninggalkan rumah mereka. Mereka harus memulai hidup dari awal dan menghadapi tantangan besar yang berpotensi menyebabkan kemiskinan. Migrasi ini menempatkan orang-orang dalam persaingan yang berat untuk sumber daya seperti pekerjaan dan tempat tinggal di wilayah baru mereka. Banyak wilayah di mana para pengungsi yang baru tiba memulai kehidupan mereka tergolong miskin dan tidak memiliki akses ke infrastruktur dasar yang memungkinkan mereka untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Belum lagi banyak penduduk asli Pakistan yang tidak suka dengan kedatangan para pengungsi di wilayah mereka karena mereka harus bersaing dengan orang baru dalam mencari pekerjaan, lahan yang subur dan sumber daya lain yang langka. Migrasi besar-besaran ini dalam jangka panjang telah menyebabkan kemiskinan terus berlanjut di Pakistan. Tidak hanya itu, kekalahan perang pihak Pakistan dalam konflik antara Pakistan dengan India menyangkut Kashmir juga turut andil pada kemerosotan ekonomi di Pakistan. Hal ini juga mengakibatkan taraf hidup masyarakat Pakistan semakin menurun hingga terjadi kemiskinan bagi warga Pakistan. (Monica dan Rhoma, 2017).

Pada dekade 1950an, meskipun ekonomi Pakistan menunjukkan pertumbuhan yang konstan dan stabil dengan laju pertumbuhan sekita 5% per tahun. perkembangan ekonomi ini tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan standar hidup dan kemiskinan masih menjadi masalah yang signifikan di negara tersebut. Kebijakan substitusi impor yang diberlakukan pemerintah Pakistan pada tahun-tahun tersebut mengakibatkan Pakistan menjadi ketergantungan pada teknologi impor dan kurangnya pasokan bahan baku sendiri. Selain itu, penentuan tarif yang tinggi terhadap impor barang membuat biaya makin mahal, sehingga menimbulkan inflasi dan harga menjadi mahal. Hal ini dapat memperburuk kemiskinan di antara masyarakat dan mengurangi daya beli mereka. Menurut (Muhammad Zahir, 2021) meskipun Pakistan berhasil mengembangkan ekspornya, namun negara tersebut kemudian jatuh ke dalam kecanduan bantuan asing. Pada tahun 1958, Pakistan menerapkan keadaan

darurat militer setelah memberikan izin ekspor yang disebut bonus ekspor. Akibatnya, tingkat pertumbuhan pertanian dan pendapatan per kapita menurun, dan standar hidup masyarakat semakin memburuk.

Pada perkembangannya, kondisi kemiskinan yang telah terjadi pada dekade pertama semakin meningkat pada dekade kedua ini. Pada tahun 1960an, mayoritas masyarakat Pakistan hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak memiliki akses yang memadai seperti air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan dasar. Sebagian besar penduduk Pakistan tidak memiliki akses ke pendidikan yang memadai, sehingga tingkat melek hurufnya sangat rendah. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan hidup dalam kemiskinan ekstrem dan sering kali mengalami bencana banjir dan kekeringan. Kondisi ekonomi negara Pakistan sangat buruk, dan tingkat pengangguran serta inflasi sangat tinggi. Selain itu, pertumbuhan industri dan urbanisasi mempercepat pertumbuhan permintaan energi di Pakistan. Krisis energi mulai muncul akibat tidak sesuainya penawaran energi dengan permintaan. Krisis ini membawa dampak langsung pada perekonomian negara yang bergantung pada produksi industri dan pertambangan. Situasi dan kondisi ini terjadi disebabkan karena terjadi ketimpangan antara pendapatan dan standar hidup yang terus berlanjut akibat pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak merata. Hal ini sesuai dengan pernyataan Junaid dan Waqar (2005:185) bahwa :

Pakistan mencapai pembangunan ekonomi tetapi dengan mengorbankan keadilan sosial. GNP tumbuh dengan cepat, tetapi begitu pula kecondongan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, menyebabkan kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Ekspansi industri memang luar biasa tapi ekonomis kekuasaan menjadi terkonsentrasi di tangan kelas elit kecil. Domestik bruto tabungan sebagai bagian dari GNP meningkat tajam.

Dari pernyataan tersebut dapat diambil pengertian bahwa meskipun terjadi peningkatan ekonomi, kemiskinan masih menjadi masalah yang serius di Pakistan pada 1960-an. Beberapa daerah yang terpencil masih sangat miskin, dan program pembangunan tidak mencapai semua orang. Program pengembangan ekonomi tidak menekankan pada upaya untuk meningkatkan distribusi pendapatan secara merata, dan baik hasil maupun keuntungan terkonsentrasi pada segelintir kelompok kaya yang memiliki akses pada sumber daya, jaringan, dan dukungan pemerintah. Hal ini menyebabkan masalah utama berkaitan dengan pengambilan kebijakan ekonomi tradisional, di mana konsep pengembangan tidak menjawab persyaratan agar pertumbuhan ekonomi bisa

dikonversi ke dalam kehidupan yang lebih baik bagi rakyat. Meskipun perkembangan ekonomi di Pakistan meningkat pada dekade tersebut, tetapi tingginya tingkat kemiskinan tetap menjadi masalah utama yang harus diatasi oleh pemerintah dengan kebijakan yang berkesinambungan dan konsisten. Kondisi seperti ini berlanjut hingga tahun 1970 yang berdampak pada perpecahan.

E. Segi Pedagogis

1. Upaya konsolidasi dan pembentukan konstitusi yang kuat mengajarkan kita pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, ini mengajarkan kita untuk menghargai pendapat orang lain, mendengarkan pendapat kontroversial yang berbeda, serta menentukan pendapat bersama, tidak hanya untuk kepentingan pribadi.
2. Pergantian pemimpin di suatu negara menyebabkan sistem pemerintahan yang ada di negara tersebut berubah pula sesuai kehendak pemimpinnya. Hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan di negara itu. Pelajaran yang dapat diambil dari hal tersebut adalah pentingnya memilih pemimpin yang baik dan amanah. Kita diajarkan untuk dapat melihat masa depan dan membuat keputusan yang baik dan sesuai untuk kebaikan di masa mendatang, serta tidak membiarkan diri kita terjebak dalam keputusan yang buruk.
3. Keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Pakistan selama periode 1948-1970 mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat, namun ketimpangan ekonomi dan kemiskinan juga meningkat. Dari hal tersebut dapat diambil pelajaran bahwa pentingnya menabung dan mengelola keuangan dengan baik dengan cara menerapkan manajemen keuangan yang sehat dan membuat rencana pengeluaran yang dibutuhkan. Selain itu, penting untuk kita mengembangkan keterampilan dan usaha yang produktif serta mampu menjalankan bisnis yang menguntungkan.
4. Kemiskinan, inflasi, dan krisis energi yang terjadi di Pakistan dapat mengajarkan pentingnya hidup hemat, berkembang diri, dan membumikan energi terbarukan. Kita harus mengelola uang dengan baik, menghindari utang yang berlebihan, dan belajar bagaimana menghemat uang. Selain itu, kita juga harus mencari cara alternatif untuk menghemat

energi dan menghemat biaya. Selain itu, kita harus mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan.